

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI http://kliping.dpr.go.id

Judul : Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Korban PHK: BLT Buat Pekerja Bergaji Dibawah Rp 5 juta

Tanggal : Jumat, 28 Agustus 2020

Surat Kabar : Rakyat Merdeka

Halaman : 7

BLT Buat Pekerja Bergaji Di Bawah Rp 5 Juta

Ketua DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Korban PHK

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah juga memperhatikan nasib tenaga kerja yang jadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam program pendistribusian Bantuan Langsung Tunai (BLT).

JADI, BLT jangan hanya didistribusikan pada pekerja anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah Rp 5 juta saja, tapi juga pada tenaga kerja yang kena PHK.

Puan memberikan perhatian khusus pada program pendistribusian BLT kepada anggota BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah Rp 5 juta yang baru saja diluncurkan Presiden Jokowi.

Dia juga mewanti-wanti ke-

pada pemerintah agar mengedepankan kecepatan dan ketepatan sasaran pada pendistribusian BLT bagi anggota BPJS Ketenagakerjaan yang bergaji di bawah Rp 5 juta.

"Pelaksanaan transfer subsidi gaji ke rekening pekerja diharapkan dapat dilakukan cepat dan tepat, agar dampak pemulihan ekonomi juga bisa dirasakan para pekerja mandiri bergaji di bawah Rp 5 juta. Pemerintah juga harus memperhatikan dan mencari

solusi bagi para pekerja yang tidak memiliki keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan," ujar Puan.

Selain itu, lanjut Puan, pemerintah juga perlu menjalankan serangkaian kebijakan yang dapat memulihkan perekonomian nasional, menyangkut tenaga kerja yang mengalami PHK.

"Pemenuhan kebutuhan dasar rakyat tidak bisa ditunda. Pemerintah harus mampu menyusun dan melaksanakan kebijakan yang adil dan berkeperimanusiaan," tandasnya.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengajak seluruh elemen bangsa memperkuat solidaritas untuk mengatasi persoalan ekonomi nasional. Seluruh elemen bangsa harus mengedepankan semangat kemanusiaan, tanpa memandang suku, agama, ras dan perbedaan lainnya.

"Dalam situasi seperti ini, solidaritas kemanusiaan harus diperkuat. Kita harus memikirkan dampak nyata yang dihadapi masyarakat, khususnya mereka yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan dan pendapatan," ujar Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Lebih lanjut, Ketua Umum PKB ini mengakui, pemerintahan Jokowi telah bekerja keras mengatasi persoalan pandemi Covid-19 dan dampak lain yang ditimbulkan. Pemerintah telah berupaya mengatasi persoalan ekonomi masyarakat

melalui bantuan sembako, BLT, dan sejumlah program lain dari berbagai kementerian.

"Kita akui, pemerintah sudah bekerja keras untuk mengatasi dampak pandemi. Para dermawan di luar koordinasi pemerintah, termasuk partai politik pun ikut menjadi bagian penyelamat perut warga di tengah segala keterbatasan," katanya.

Terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengapresiasi langkah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang menyiapkan tambahan anggaran Rp 1,2 triliun kepada para nelayan terdampak Covid-19. III ONI